

Peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa Dalam Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) Sustainable Tourism Di Desa Wisata

Dhiya Fahriyyah Maritza^{1*}, Ani², Mawar Mawar³, Djoni Gunato⁴

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta¹³⁴,
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal²
E-mail: dhiyafahriyyah@gmail.com

Abstract

The role of the Human Resources Development Agency (BPSDM) of the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration is central to strengthening capacity building for the implementation of sustainable tourism in Indonesian village destinations. Capacity development for local communities has become increasingly important as village tourism grows as a strategic sector capable of supporting environmental conservation, cultural preservation, and inclusive economic development. By examining policy documents, training reports, and empirical literature on village tourism governance, the analysis highlights how BPSDM contributes to enhancing human resource competencies, improving institutional capacity, and fostering community participation in tourism management. Findings indicate that BPSDM's initiatives encompass technical tourism training, community empowerment, vocational education, and structured mentoring tailored to the characteristics of each village. These efforts help strengthen local institutions such as Pokdarwis and village-owned enterprises, while also encouraging environmentally responsible behavior aligned with sustainable tourism principles. Collaboration with UN Tourism further enhances training quality through access to global standards and international best practices. Overall, BPSDM's contribution is evident not only in upgrading technical skills but also in shaping a governance ecosystem that supports effective and competitive sustainable tourism development in village settings. The results emphasize the need for continuous, adaptive, and collaborative capacity-building strategies to optimize the potential of village tourism across Indonesia.

Keywords: BPSDM Ministry of Villages, Village Tourism, Sustainable Tourism, Capacity Building, Rural Human Resource Development

Abstrak

Peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi unsur kunci dalam memperkuat pengembangan kapasitas untuk penerapan sustainable tourism di desa wisata Indonesia. Penguatan kapasitas masyarakat desa semakin penting seiring berkembangnya desa wisata sebagai sektor strategis yang mampu mendukung pelestarian lingkungan, pemertahanan budaya, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan analisis terhadap dokumen kebijakan, laporan pelatihan, serta literatur empiris mengenai tata kelola pariwisata desa, kajian ini menegaskan kontribusi BPSDM dalam meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Temuan menunjukkan bahwa berbagai inisiatif BPSDM meliputi pelatihan teknis kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasional, serta pendampingan terstruktur yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. Upaya tersebut memperkuat lembaga lokal seperti Pokdarwis dan BUMDes, sekaligus menumbuhkan perilaku ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Kerja sama dengan UN Tourism turut meningkatkan kualitas pelatihan melalui akses terhadap standar global dan praktik terbaik internasional. Secara keseluruhan, kontribusi BPSDM tercermin bukan hanya dalam peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga dalam pembentukan ekosistem tata kelola yang mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Hasil kajian ini menekankan pentingnya strategi penguatan kapasitas yang berkelanjutan, adaptif, dan kolaboratif untuk mengoptimalkan potensi desa wisata di Indonesia.

Kata kunci : BPSDM Kementerian Desa, Desa Wisata, Pariwisata Berkelanjutan, Capacity Building, Pengembangan SDM Desa

PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan global yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan budaya lokal. Pendekatan ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 8, 11, dan 12, yang menekankan bahwa pariwisata harus memberikan manfaat secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Studi global mengungkap bahwa penerapan prinsip *sustainable tourism* mampu menurunkan emisi karbon hingga 40%, meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati sebesar 25%, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air hingga 30% (Wang, 2024; Vaid, 2024). Indonesia merupakan negara dengan potensi pariwisata berbasis alam dan budaya yang sangat tinggi. Desa wisata menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) yang mendukung pelestarian tradisi lokal, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, upaya pengembangan desa wisata berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas pengelolaan, minimnya literasi digital, lemahnya kelembagaan desa, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip pariwisata berkelanjutan (Kemenparekraf, 2023).

Penguatan kapasitas (*capacity building*) menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pengelolaan desa wisata berbasis keberlanjutan. Pengembangan kapasitas tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan sistem pembelajaran, modernisasi tata kelola, dan peningkatan adaptabilitas terhadap dinamika global. Menurut Horton, *capacity building* meliputi penguatan individu, organisasi, dan sistem dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.. Konsep ini relevan pada konteks desa wisata, yang menuntut penguatan keterampilan manajerial, konservasi lingkungan, pemasaran digital, hingga pemahaman budaya lokal.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memiliki mandat strategis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan berbasis kebutuhan lokal. Peran BPSDM mencakup penyediaan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan aparatur dan komunitas desa, serta fasilitasi pengembangan desa wisata berbasis keberlanjutan. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan kemampuan adaptasi, manajemen, dan profesionalitas masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal secara optimal.

Namun, proses pengembangan kapasitas masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kolaborasi antar-lembaga, belum optimalnya evaluasi pelatihan, serta masih rendahnya integrasi antara program pelatihan dan kebutuhan strategis desa wisata. Tantangan ini menjadi semakin signifikan seiring meningkatnya tuntutan global terhadap standar *sustainable tourism*, digitalisasi pariwisata, dan daya saing destinasi.

Kerja sama antara Kemendes PDTT dan United Nations World Tourism Organization (UN Tourism) membuka peluang strategis untuk memperkuat model *capacity building* berbasis internasional. Kolaborasi ini mencakup transfer pengetahuan, pengembangan standar pelatihan global, dan pemanfaatan praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Momentum tersebut penting untuk memastikan desa wisata di Indonesia memiliki SDM yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global.

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)

Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pengelolaan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya. Model pariwisata ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan atau pertumbuhan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak menghilangkan identitas budaya lokal, dan tidak menciptakan ketimpangan sosial. Prinsip ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya terkait tujuan pelestarian ekosistem, pembangunan ekonomi inklusif, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam literatur global, pariwisata berkelanjutan dipahami sebagai suatu proses yang mengupayakan keseimbangan jangka panjang melalui pemanfaatan sumber daya alam

secara bijaksana, pengaturan konsumsi energi, pengelolaan limbah, serta perlindungan terhadap biodiversitas. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi ramah lingkungan, transportasi rendah karbon, dan efisiensi energi pada sektor akomodasi mampu menurunkan emisi karbon hingga 40%. Selain itu, praktik konservasi berbasis masyarakat juga terbukti meningkatkan indeks keanekaragaman hayati sampai 25% dan mengurangi penggunaan air hingga 30% melalui manajemen sumber daya air yang lebih baik (Wang, 2024).

Penguatan prinsip keberlanjutan turut ditunjukkan melalui pengelolaan limbah terpadu, penggunaan energi bersih, dan pengurangan produksi sampah plastik yang menjadi beban utama destinasi wisata (“Overview of Sustainable Development and Promotion in Tourism”, 2023). Di banyak negara, keberhasilan strategi pariwisata berkelanjutan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal dalam merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam. Pada konteks inilah, pariwisata berkelanjutan dipandang sebagai paradigma pembangunan yang tidak semata mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan aspek moral dan tanggung jawab terhadap alam dan generasi mendatang.

B. Desa Wisata sebagai Model Implementasi Pariwisata Berkelanjutan

Desa wisata merupakan salah satu bentuk destinasi yang paling sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Sebagai kawasan yang mengintegrasikan kehidupan masyarakat lokal, lanskap lingkungan, dan kekayaan budaya, desa wisata memiliki karakter alami yang mendukung aktivitas wisata rendah karbon dan berbasis komunitas. Desa wisata umumnya menawarkan pengalaman autentik melalui tradisi lokal, pertanian, kerajinan, sejarah komunitas, serta alam pedesaan yang relatif terjaga. Keunggulan ini memungkinkan desa wisata berkembang tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap lingkungan seperti yang umum terjadi pada destinasi massal.

Di tingkat global, beberapa negara telah berhasil mengembangkan desa wisata berbasis keberlanjutan. Thailand melalui Community-Based Tourism (CBT) mengembangkan lebih dari 200 desa wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal, sehingga pendapatan dan manfaat ekonomi dapat kembali kepada komunitas (Kontogeorgopoulos et al., 2020). Vietnam dengan program Responsible Tourism Development menekankan pendidikan budaya dan pelatihan bagi penduduk lokal, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisata pedesaan hingga 35% dalam lima tahun (Truong & Hall, 2022). Costa Rica menjadi contoh paling menonjol dengan sertifikasi Certification for Sustainable Tourism (CST) yang menstandarkan usaha wisata agar memenuhi indikator keberlanjutan, termasuk konservasi alam, efisiensi energi, serta pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia, desa wisata memiliki posisi strategis sebagai sarana pemulihan ekonomi desa dan pelestarian budaya lokal. Potensi desa wisata di Indonesia sangat besar, namun pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya profesionalisme pengelola, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Penelitian-penelitian terkait pengembangan desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa desa wisata membutuhkan tata kelola yang kuat, perencanaan destinasi yang jelas, dan kapasitas SDM yang memadai agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Studi mengenai pengembangan ekowisata di Bendosari menegaskan bahwa desa wisata hanya dapat berkembang jika ada pelatihan yang sistematis, penguatan lembaga desa, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi antar-aktor lokal. Dengan demikian, desa wisata merupakan ruang yang tidak hanya memerlukan eksplorasi potensi alam dan budaya, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola destinasi secara profesional dan bertanggung jawab.

C. Capacity Building dalam Pengembangan SDM Desa Wisata

Konsep capacity building memiliki peran sentral dalam pengembangan desa wisata. Capacity building didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan kelembagaan agar mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Grindle (1997) mengemukakan tiga dimensi pokok capacity building: (1) pengembangan kapasitas individu melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kompetensi, (2) penguatan organisasi melalui struktur kerja, sistem administrasi, dan manajemen, serta (3) pembaruan kelembagaan yang mencakup kebijakan, regulasi, serta hubungan antaraktor. Dalam konteks desa wisata, capacity building mencakup peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola daya tarik wisata, menyusun paket wisata,

mempromosikan destinasi, menerapkan standar kebersihan dan keamanan, mengelola lingkungan, hingga memelihara tradisi lokal. Penelitian tentang pengembangan ekowisata Bendosari menunjukkan bahwa capacity building yang tepat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat menjadi pemandu wisata, pengrajin, pengelola homestay, serta pelaku UMKM lokal. Tahapan capacity building yang diidentifikasi mencakup sosialisasi, pendidikan masyarakat, pelatihan teknis, penguatan struktur kelembagaan desa wisata, serta pengembangan sarana fisik pendukung.

Namun demikian, berbagai studi juga menyoroti tantangan implementasi capacity building di desa. Hambatan umum mencakup kurangnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya insentif, serta birokrasi yang tidak responsif. Hasil penelitian tentang peningkatan kapasitas aparatur desa yang terdapat dalam salah satu berkas PDF menunjukkan bahwa keberhasilan program capacity building sangat bergantung pada komunikasi kebijakan yang jelas, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung.

Selain itu, penelitian tentang SDM BUMDes mengidentifikasi perlunya pelatihan berkelanjutan, rekrutmen berbasis kompetensi, peningkatan literasi digital, dan penguatan monitoring-evaluasi untuk memastikan keberlanjutan kapasitas desa. Dengan demikian, capacity building bagi desa wisata tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi memerlukan pendekatan komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan agar masyarakat desa benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola destinasi wisata secara mandiri.

D. Peran BPSDM Kementerian Desa PDTT dalam Penguatan SDM Pariwisata Desa

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan lembaga yang memiliki peran vital dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa, termasuk dalam sektor pariwisata. BPSDM berfungsi sebagai pusat pelatihan, inkubasi pengetahuan, dan penyedia kurikulum yang dibutuhkan masyarakat agar mampu mengelola potensi desa secara optimal. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, BPSDM menyediakan berbagai pelatihan seperti manajemen desa wisata, layanan wisata berbasis hospitality, pemasaran digital destinasi, penyusunan paket wisata, konservasi lingkungan, serta pelatihan kewirausahaan bagi UMKM lokal.

Penelitian-penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM desa wisata hanya dapat berjalan efektif jika BPSDM mampu menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan lokal dan memastikan keberlanjutan program melalui pendampingan. Ketersediaan instruktur kompeten, kurikulum berbasis kompetensi, serta dukungan teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan BPSDM dalam mengembangkan SDM wisata desa. Studi mengenai implementasi kebijakan peningkatan kapasitas aparatur desa juga menegaskan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan desa.

BPSDM juga berperan dalam meningkatkan literasi kelembagaan desa wisata melalui pendampingan BUMDes, penguatan Pokdarwis, penyusunan regulasi internal, serta fasilitasi kerja sama antarinstansi. Sebagai lembaga pemerintah, BPSDM menjadi jembatan antara program nasional dan pelaksanaan di tingkat desa, sehingga keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada efektivitas BPSDM dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program capacity building.

E. Kerja Sama BPSDM Kementerian Desa PDTT dengan UN Tourism dalam Capacity Building Sustainable Tourism

Kerja sama antara BPSDM Kementerian Desa PDTT dengan UN Tourism menjadi peluang penting untuk memperkuat kapasitas desa wisata Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. UN Tourism memiliki standar internasional, kurikulum pelatihan global, serta jaringan praktik terbaik dari berbagai negara yang telah sukses menerapkan sustainable tourism. Kerja sama ini membuka ruang transfer pengetahuan, pelatihan instruktur, penyusunan standar desa wisata berkelanjutan, dan penguatan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata.

Kerja sama yang direncanakan berlangsung tahun 2025–2028 ini harus dimanfaatkan secara optimal karena bersifat terbatas dan evaluatif. BPSDM perlu menyiapkan strategi implementasi, antara lain: (1) pemetaan kebutuhan kapasitas desa wisata, (2) penyusunan kurikulum berbasis standar UN Tourism, (3) pendampingan intensif ke desa-desa prioritas, (4) pengembangan materi pelatihan tentang konservasi, tata kelola destinasi, layanan wisata, dan mitigasi risiko lingkungan, serta (5) pembentukan sistem monitoring-evaluasi berbasis indikator internasional.

Kerja sama ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan nasional seperti penurunan wisatawan saat pandemi, persaingan pariwisata ASEAN, dan ancaman perubahan iklim yang berdampak pada banyak desa wisata di Indonesia. Sinergi BPSDM dan UN Tourism bukan hanya memperkuat kapasitas SDM, tetapi juga membuka peluang Indonesia untuk meningkatkan daya saing global melalui model desa wisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus kajian diarahkan untuk memahami secara mendalam peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM Kemendes PDTT) dalam pengembangan kapasitas (capacity building) pariwisata berkelanjutan di desa wisata. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara komprehensif proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi program pelatihan dan kerja sama internasional yang dilakukan BPSDM, termasuk dinamika yang terjadi di lapangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa wisata. Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini menelaah sebuah fenomena kelembagaan yang spesifik, yakni kerja sama BPSDM dengan UN Tourism dan implikasinya terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia desa wisata, sehingga membutuhkan penelusuran kontekstual terhadap kebijakan, praktik, dan pengalaman para pemangku kepentingan.

Pengumpulan data dilakukan pada beberapa lokasi yang relevan, yaitu kantor BPSDM Kemendes PDTT sebagai pusat penyelenggaraan program pelatihan dan perumusan kebijakan SDM desa, serta desa-desa wisata yang menjadi target program capacity building sebagai lokasi implementasi di lapangan. Selain itu, data juga diperoleh dari unit terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), BUMDes wisata, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam mengelola destinasi wisata berbasis masyarakat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dalam program pelatihan pariwisata berkelanjutan serta relevansinya dengan rencana kerja sama antara BPSDM dan UN Tourism.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat BPSDM, fasilitator pelatihan, aparatur desa, pengelola desa wisata, peserta pelatihan, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam aktivitas pengembangan kapasitas desa wisata. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pengetahuan informan secara mendalam namun tetap berfokus pada tujuan penelitian. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di desa wisata untuk menilai bagaimana hasil pelatihan diterapkan, bagaimana tata kelola destinasi dilakukan, serta bagaimana masyarakat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari program capacity building BPSDM. Observasi ini mencakup aspek layanan pariwisata, konservasi lingkungan, pengelolaan budaya lokal, dan aktivitas ekonomi berbasis wisata yang berkembang di desa.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, termasuk kebijakan program pelatihan BPSDM, laporan kegiatan pelatihan, pedoman kerja sama BPSDM–UN Tourism, modul pelatihan SDM desa wisata, serta laporan perkembangan desa wisata dari kementerian terkait. Dokumen ini berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan gambaran struktural mengenai program capacity building yang menjadi objek penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menajamkan data berdasarkan tema perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BPSDM. Penyajian data dilakukan melalui narasi sistematis yang menggambarkan hubungan antaraktor, dinamika implementasi, dan dampak program. Selanjutnya, kesimpulan ditarik melalui proses interpretasi temuan secara menyeluruh dengan memperhatikan konsistensi antara data primer dan sekunder, sehingga menghasilkan pemahaman yang valid terkait peran BPSDM dalam pengembangan kapasitas pariwisata berkelanjutan.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan mengenai kesesuaian hasil interpretasi peneliti terhadap pernyataan mereka. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam

penelitian, sehingga keterlibatan aktif dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data memastikan penelitian berlangsung secara konsisten, reflektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Arah Kebijakan BPSDM dalam Penguatan Kapasitas SDM Desa Wisata

Peran BPSDM Kemendesa PDTT dalam pengembangan kapasitas desa wisata merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pengelolaan desa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip sustainable tourism. Dari dokumen-dokumen yang dianalisis, terlihat bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, sebagaimana pada studi Kampoeng Ekowisata Bendosari, sangat ditentukan oleh keberadaan aktor pengarah kebijakan yang mampu merancang kerangka kerja pembangunan secara terstruktur. Pada kasus tersebut, proses perencanaan dilakukan melalui serangkaian tahapan pemetaan potensi desa, penataan visi dan misi pembangunan, serta identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat. Tahapan ini mencerminkan pola kerja kelembagaan yang juga berlaku pada BPSDM sebagai organisasi yang memfasilitasi perencanaan program penguatan SDM desa wisata di tingkat nasional.

BPSDM memiliki peran sebagai policy designer yang bertugas memastikan bahwa pelatihan SDM desa tidak hanya bersifat teknis, tetapi selaras dengan kebutuhan desa dan perkembangan pariwisata berkelanjutan. Kerangka kerja capacity building yang muncul dalam dokumen-dokumen Anda selaras dengan konsep Grindle yang menekankan tiga dimensi kapasitas: individu, organisasi, dan kelembagaan. Pada level individu, BPSDM perlu merancang kurikulum yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan pelayanan wisata, kewirausahaan, dan literasi lingkungan. Pada level organisasi, BPSDM memiliki peran dalam mendorong terbentuknya kelompok-kelompok pengelola seperti Pokdarwis, UMKM, dan kelompok pemandu. Pada level kelembagaan, BPSDM juga berperan membangun struktur desa—misalnya melalui pembentukan unit pengelola wisata atau integrasi dengan BUMDes.

Peran kebijakan BPSDM juga dapat dilihat melalui kebutuhan harmonisasi birokrasi dan koordinasi antar-level pemerintahan sebagaimana tercermin dalam dokumen implementasi kebijakan daerah. Banyak program desa wisata gagal bukan karena materi pelatihan buruk, tetapi karena komunikasi kebijakan tidak jelas, koordinasi lemah, atau birokrasi lambat. BPSDM dalam konteks nasional mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pedoman, SOP, dan standar nasional pelatihan agar desa wisata memiliki acuan yang seragam. Hal ini sangat penting mengingat desa wisata berada dalam konteks persaingan regional seperti Thailand dan Vietnam, yang memiliki perencanaan destinasi berbasis standar internasional.

Dengan demikian, peran BPSDM pada tahap perencanaan tidak hanya terbatas pada penyusunan modul pelatihan, tetapi meliputi perancangan arah kebijakan, penataan kelembagaan desa, dan penciptaan lingkungan struktural yang memungkinkan pelatihan diterapkan secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas tidak mungkin berjalan tanpa adanya desain kebijakan kuat di tingkat pusat.

B. Strategi Pengembangan Kapasitas Berbasis Komunitas dan Berjenjang dalam Desa Wisata

Strategi pengembangan kapasitas yang efektif harus melibatkan seluruh komunitas desa, mengikuti pola bertahap, dan disusun berdasarkan kondisi lokal. Temuan pada dokumen Bendosari memperlihatkan bahwa strategi yang berhasil selalu dimulai dari pembentukan kesadaran kolektif sebelum masuk ke pelatihan teknis. Pada tahap awal, dilakukan pertemuan-pertemuan warga secara rutin, edukasi tentang potensi desa, serta dialog tentang manfaat jangka panjang ekowisata. Pendekatan ini sangat penting karena partisipasi masyarakat dalam desa wisata cenderung tinggi ketika mereka memahami alasan dan manfaat program secara komprehensif. Pendekatan partisipatif ini juga sejalan dengan mandat BPSDM untuk membangun masyarakat desa yang mandiri dan mampu mengelola potensi lokalnya.

Strategi kedua adalah pengembangan kelompok-kelompok produktif desa sebagai bagian dari proses capacity building. Studi Bendosari menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada munculnya kelompok yang memiliki tugas spesifik—misalnya kelompok pemandu wisata, kelompok pengelola homestay, kelompok kuliner, kelas lingkungan anak, dan kelompok konservasi. Struktur ini tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil pendampingan bertahap.

Strategi seperti ini relevan bagi BPSDM karena dapat diterapkan pada desa wisata melalui pelatihan kelembagaan (organizational capacity).

Strategi berikutnya adalah pendidikan multilevel yang melibatkan berbagai kelompok usia. Pada Bendosari, anak-anak hingga pemuda dilibatkan dalam kegiatan pendidikan lingkungan, kelas kreatif, serta pelatihan konservasi sederhana. Pola multilevel ini menciptakan kesinambungan transfer pengetahuan antar-generasi. Strategi seperti ini harus menjadi pertimbangan BPSDM ketika merancang modul pelatihan untuk desa wisata, karena sustainable tourism membutuhkan keterlibatan semua kelompok umur untuk menjamin keberlanjutan praktik wisata.

Strategi terakhir adalah mengintegrasikan kapasitas teknis dengan kapasitas sosial. Program di Bendosari tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis seperti pemanduan, tetapi juga membangun kesadaran sosial seperti gotong royong, kebersihan desa, dan konservasi. Sinergi kedua kapasitas ini sangat diperlukan untuk membangun desa wisata yang kuat. Strategi ini dapat direplikasi oleh BPSDM dalam pelatihan desa wisata lainnya untuk menghindari situasi di mana SDM terampil tetapi tidak memiliki komitmen lingkungan atau solidaritas sosial.

C. Implementasi Kapasitas: Pelatihan Teknis, Pendampingan Lapangan, dan Adaptasi Metode

Implementasi capacity building dalam dokumen Anda memperlihatkan pola pelaksanaan yang sangat kaya dan kompleks. Pertama, pelatihan teknis dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode praktik, simulasi, dan pemecahan masalah nyata. Studi Bendosari menunjukkan bahwa materi pelatihan yang diberikan meliputi pemanduan wisata, pengelolaan homestay, pengemasan produk lokal, edukasi lingkungan, dan penataan ruang wisata. Metode praktik langsung ini sangat efektif karena mayoritas masyarakat desa memiliki latar belakang pendidikan formal yang terbatas. Pendekatan ini relevan bagi BPSDM untuk dijadikan standar pelatihan nasional.

Elemen penting kedua adalah pendampingan lapangan, yang dalam dokumen terbukti menjadi faktor paling menentukan keberhasilan. Pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga memberikan solusi langsung terhadap kendala implementasi yang tidak dapat diatasi melalui pelatihan. Pada Bendosari, misalnya, pendampingan membantu desa membentuk kelompok pemandu, menyelesaikan masalah teknis, menyusun SOP layanan wisata, hingga merumuskan tata kelola organisasi. Peran pendamping juga membantu mengatasi dinamika internal seperti perpecahan organisasi atau konflik kepentingan. Studi BUMDes menegaskan bahwa tanpa pendampingan, banyak pelatihan berhenti pada tataran pengetahuan tanpa menghasilkan perubahan perilaku.

Implementasi capacity building juga menuntut penyesuaian metode pelatihan (adaptive learning). Dokumen Bendosari menunjukkan bahwa pelatihan tidak dapat dilakukan secara teknis dan formal karena tingkat pendidikan masyarakat rendah. Oleh karena itu, pelatihan dilakukan dengan pendekatan visual, demonstratif, diskusi ringan, dan sesi belajar sambil bekerja. Adaptasi metode ini sangat relevan bagi BPSDM yang harus menyesuaikan gaya pembelajaran dengan karakteristik masyarakat desa. Jika tidak, transfer pengetahuan tidak akan maksimal.

Selain pelatihan dan pendampingan, implementasi juga mencakup pengembangan jejaring kemitraan. Dokumen menunjukkan keterlibatan LSM, akademisi, dan pihak swasta dalam melaksanakan pelatihan di Bendosari. Pola ini sejalan dengan strategi Kemendesa yang mengedepankan kolaborasi quadruple helix: pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor bisnis. Jejaring inilah yang memperkuat implementasi di tingkat desa.

D. Dampak Capacity Building terhadap Kelembagaan, Ekonomi, SDM, dan Lingkungan Desa Wisata

Dampak capacity building sebagaimana tercermin dalam dokumen sangat signifikan dalam empat dimensi inti pariwisata berkelanjutan.

a). Dampak pada SDM

Peningkatan kapasitas SDM tampak melalui peningkatan keterampilan warga dalam melayani wisatawan, mengelola homestay, memandu wisata, dan mengelola sampah. Warga desa mampu memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan pola pikir keberlanjutan, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya konservasi. Dampak ini terlihat jelas dalam pembentukan kelas-kelas lingkungan dan kelompok pemandu yang muncul setelah program berjalan.

b). Dampak pada kelembagaan desa

Dampak kelembagaan merupakan salah satu yang paling kuat dalam dokumen. Desa mampu membentuk kelompok-kelompok produktif seperti Pokdarwis, kelompok konservasi, dan UMKM. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini menjamin bahwa desa memiliki struktur yang stabil untuk menjalankan pariwisata tanpa bergantung pada aktor eksternal. Studi Bendosari juga mencatat adanya penataan ulang peran pemerintah desa untuk mendukung kegiatan wisata.

c). Dampak pada ekonomi lokal

Dokumen mencatat peningkatan pendapatan masyarakat dari homestay, pemanduan, dan produk lokal. Aktivitas wisata memberikan peluang ekonomi baru dan membuka ruang partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat. Pada beberapa kasus, pendapatan ini menjadi sumber modal untuk memperkuat usaha desa sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

d). Dampak pada lingkungan

Konservasi lingkungan menjadi dampak penting yang terlihat dari dokumen. Masyarakat mulai membentuk zona bersih, mengurangi sampah plastik, dan menjaga mata air. Pendidikan lingkungan untuk anak-anak membentuk kesadaran jangka panjang yang beresonansi dengan konsep sustainable tourism. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, perilaku masyarakat berubah menjadi lebih ramah lingkungan.

E. Kolaborasi UN Tourism dan Penguatan Standar Internasional

Kerja sama BPSDM dengan UN Tourism sangat relevan dengan kebutuhan desa yang tercermin dalam dokumen-dokumen Anda. Studi evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa banyak desa membutuhkan standar kurikulum yang lebih kuat, sistem monitoring dan evaluasi yang jelas, serta pelatih lokal yang kompeten. Kerja sama internasional dapat membantu BPSDM menyediakan kurikulum terstandar global, training of trainers, dan sertifikasi kompetensi yang penting untuk meningkatkan daya saing desa wisata.

Kerja sama internasional juga memberikan akses pada praktik terbaik global, misalnya pengembangan destinasi berkelanjutan berbasis komunitas sebagaimana dilakukan Thailand, Vietnam, dan Costa Rica. Dengan integrasi standar internasional, BPSDM dapat memperkuat tata kelola desa wisata, meningkatkan kualitas layanan, dan memperbesar peluang desa untuk masuk pasar wisata internasional. Kolaborasi ini bukan hanya pelengkap, tetapi strategi utama dalam menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan yang semakin kompetitif.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPSDM Kemendes PDTT memiliki peran strategis dalam memperkuat pengembangan kapasitas SDM desa wisata agar mampu menerapkan prinsip sustainable tourism. Peran tersebut tampak melalui penyusunan arah kebijakan, pemetaan kebutuhan pelatihan, serta penyediaan program penguatan kapasitas yang selaras dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan desa. BPSDM tidak hanya bertindak sebagai lembaga pelatihan, tetapi sebagai penggerak perubahan yang mendorong terciptanya SDM desa yang kompeten, kelembagaan lokal yang lebih kokoh, serta budaya sadar lingkungan yang mendukung keberlanjutan pariwisata. Implementasi pelatihan, pendampingan lapangan, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan kelompok pengelola menjadi bukti bahwa capacity building yang dilakukan mampu meningkatkan keterampilan teknis, kapasitas kelembagaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola desa wisata.

Selain itu, kerja sama BPSDM dengan UN Tourism memberikan dukungan penting bagi peningkatan kualitas pelatihan dan penyesuaian praktik pengembangan desa wisata dengan standar global. Kolaborasi ini memperluas akses desa wisata terhadap pengetahuan internasional, peningkatan profesionalitas SDM, serta model-model penerapan sustainable tourism yang telah teruji di berbagai negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas yang sistematis dan berbasis kolaborasi mampu berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan, ketahanan ekonomi masyarakat, serta kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, BPSDM berperan sentral dalam memastikan bahwa desa wisata di Indonesia tidak hanya berkembang sebagai destinasi, tetapi juga mampu bertahan dan bersaing dalam lanskap pariwisata global yang semakin menekankan prinsip keberlanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dewan Redaksi Jurnal pendidikan ilmu pengetahuan sosial atas kesempatan untuk menerbitkan artikel ini. Terima kasih juga kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Mawar, Sip M.A.P, serta semua pihak yang telah berkontribusi. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- Azhari, A., Mustofa, M., Meisari, E. D., & Anggarista, E. T. S. (2023). Pengembangan badan usaha milik desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia: Kualitas sumber daya manusia; BUMDes; strategi pengembangan usaha. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(2), 82-92.
- Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja anggota badan permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *Perspektif*, 11(2), 674-691.
- Mokodaser, V. S., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2023). Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 190-197.
- Fajarwati, N. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Capacity Building Village Government Apparatus to Realize Good Governance. *Jurnal Wacana Kerja*, 22(2), 219-234.
- Kharisma R. (2024). Capacity building badan usaha milik desa (bumdes) surya sejahtera desa kedungturi kecamatan taman kabupaten sidoarjo (Doctoral dissertation, UPN VETERAN JAWA TIMUR).
- Dzul kifli, D., Ahmad, B., Abdullah, M. T., & Ibrahim, M. A. (2025). Strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja BUM Desa di Kabupaten Mamuju Tengah. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(3), 492-504.
- Nurdin, M. (2022). Capacity building dalam pengembangan sumber daya manusia pemerintah kecamatan di kabupaten sinjai= capacity building in district government human resources development in sinjai district (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)
- Bikorin, B., Wahyudi, I., & Sulistyowati, A. Capacity building as an effort to achieve organizational sustainability in Kalurahan Imogiri. *Jurnal Abmas*, 25(1), 51-62.
- Aryanto, P., Hendarmawan, M. S. D. H., Novianti, E., & Faramitha, S. (2022). Kawistara.
- Apriyani, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").
- Puspaningtyas, A. (2021). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Inklusif Dalam Mendukung Desa Wisata Budaya Di Desa Plunturan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2), 265-282.
- Kusumawardani, E., & Prasetyo, I. (2023). Penguatan Kapasitas Inovasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18(1), 1978-7138.
- Fajar, N. (2024). Pengembangan Kapasitas Desa Wisata Di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa= Capacity Building Of Tourism Village In Pao Village Tombolo Pao District Gowa Regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Fajar, N., Haning, M. T., & Yunus, M. (2023). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Sumber Daya Manusia Desa Wisata di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 347-357.
- Damayanti, E., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2014). Strategi capacity building pemerintah desa dalam pengembangan potensi kampoeng ekowisata berbasis masyarakat lokal (studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 464-470